

ANALISIS KEKUATAN POTENSI LOKAL DALAM PERSPEKTIF PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Study Kasus Kabupaten Simalungun)

Oleh

Robert Tua Siregar, Perencanaan Wilayah, Univ.Simalungun,
tuasir@gmail.com

Marihot Manullang, Study Pembangunan, Univ.Simalungun,
marihot.dr@gmail.com

Abstrak

Perencanaan yang mempedomani terhadap penataan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Pendekatan potensi budaya lokal yang realita dikemas dan dikategorikan dalam teori perencanaan partisipatif (Participation Planning Theory) dalam bentuk konsep yang beragam, seperti advocacy planning, transactive planning, participatory planning, radical planning, collaborative planning, dan lain-lain. Budaya lokal atau kearifan lokal yang dalam tulisan ini sebagai salah satu potensi lokal dengan perencanaan masih belum secara eksplisit dibicarakan, karena budaya yang ada pada suatu wilayah member pengaruh pada perencanaan pembangunan serta partisipasi realita. Metode kuantitatif deskriptif yang dilakukan untuk melihat permasalahan diatas dapat member gambaran sejauh mana kekuatan potensi lokal dalam perspektif pembangunan daerah. Dengan melihat kasus di Kabupaten Simalungun yang memiliki 9 suku yaitu Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pak-pak, Melayu, Jawa, dan Nias serta suku lainnya yang berjumlah dibawah 0,02 %. Namun demikian, dalam alur partisipasi realistik tersebut, konsep dasar mengenai partisipasi dan kolaborasi antara Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat setempat. Kekuatan potensi budaya lokal memberi pengaruh dalam pola perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa dalam wilayah yang memiliki suku budaya Jawa 78 % mengimplementasi partisipasi dibandingkan dengan suku lainnya yang ada pada wilayah Kabupaten Simalungun. Artinya dukungan individu, kelompok masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, dan stakeholder perencanaan serta potensi fisik lainnya. Budaya atau kearifan budaya lokal sebagai bagian dari "practical reasoning" sesungguhnya ada dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama di negara-negara sedang berkembang bukan barat (non western culture), di samping perencanaan normatif sebagai hasil penalaran "knowledge of science dalam perencanaan. Tulisan ini menjelaskan konsep kolaborasi antara kearifan budaya lokal dengan perencanaan dalam perspektif teori perencanaan.

Kata Kunci : Perencanaan Partisipatif, Perencanaan Terintegrasi, dan Potensi Lokal.

Biografi Singkat: Penulis Pertama menyelesaikan pendidikan terakhir dari University Malaya pada Department Urban Studies and Planning Programme. Dengan melakukan penelitian disertasi tentang Analisis Potensi Wilayah Dalam Pembangunan Lokasi Agroindustri di Wilayah Barat Provinsi Sumatera Utara. Bekerja sebagai dosen pada dpk Kopertis I Medan dengan konsentrasi bidang pengajaran manajemen perencanaan pembangunan wilayah pada strata-1 dan strata 2. Fokus kajian yang dilakukan pada 5 tahun terakhir adalah pada perencanaan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.

Penulis Kedua menyelesaikan pendidikan terakhir dari Universitas Negeri Jakarta Bidang Manajemen. Bekerja sebagai dosen pada Universitas Simalungun dengan konsentrasi bidang pengajaran manajemen strategi dan sumber daya pada strata-1 dan strata 2. Fokus kajian yang dilakukan pada 5 tahun terakhir adalah pada manajemen sumberdaya dan strategi.

1. Pendahuluan

Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 telah mendorong perubahan pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Elemen-elemen utama dalam reformasi tersebut adalah demokratisasi, desentralisasi, dan pemerintahan yang bersih. Ketiga elemen utama reformasi tersebut telah mendorong terciptanya tatanan baru hubungan antara pemerintah dengan masyarakat madani dan dunia usaha; hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dan penciptaan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan. Selain itu, amendemen UUD 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, dan diisyaratkan pula tidak akan ada lagi GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) sebagai arahan bagi Pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan. Reformasi ini selanjutnya telah menuntut perlunya pembaharuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara secara nasional. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah merespon tuntutan perubahan ini dengan menetapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kini telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 dan No. 40 Tahun 2006.

Sistem perencanaan ini diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Era otonomi daerah sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 tahun 2004, memberikan peluang bagi setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri, serta tuntutan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata daerah yang ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi masyarakat. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan nasional yang terkait dengan pengelolaan potensi daerah, menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan. Peran serta masyarakat dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi dalam pembangunan daerah.

Salah satu contoh dalam sector pariwisata, seperti dinyatakan oleh Nurmawati (2006), pengembangan wisata alam dan wisata budaya dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan interkoneksi dalam tatanan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri guna meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta obyek wisata alam dan wisata budaya yang ada. Selama ini pengembangan pariwisata daerah ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saat ini perencanaan pengembangan pariwisata menggunakan *community approach* atau *community based development*. Dalam hal ini masyarakat lokal yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi dan mengurangi urbanisasi (Nurhayati, 2005).

Francis Fukuyama (1995) mengilustrasikan modal sosial dalam *trust*, *believe* and *vertrauen* artinya bahwa pentingnya kepercayaan yang mengakar dalam faktor kultural seperti etika dan moral. *Trust* muncul maka komunitas membagikan sekumpulan nilai-nilai moral, sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Ia juga menyatakan bahwa asosiasi dan jaringan lokal sungguh mempunyai dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan

pembangunan lokal serta memainkan peran penting dalam manajemen lingkungan. James S, Colement (1998) menegaskan bahwa, modal sosial sebagai alat untuk memahami aksi sosial secara teoritis yang mengkombinasikan perspektif sosiologi dan ekonomi. Pengertian ini dipertegas oleh Ismail Serageldin (1998) bahwa modal sosial selalu melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat muncul bukan semata dari interaksi pasar dan memiliki nilai ekonomis.

Untuk usaha-usaha pengembangan wilayah yang berorientasi pada masyarakat lokal masih minim. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan yang berbasis budaya. Sehingga perlunya partisipasi aktif masyarakat dilihat dari sisi etnis atau budaya untuk menjadi berbuat sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut dalam pembangunan yang merupakan salah satu potensi dalam rangka mendukung program pembangunan pada wilayahnya. Serta menanamkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengembangan daerah. Analisis potensi wilayah telah menjadi hal yang tidak asing dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini telah diamanatkan dalam konstitusi Negara yaitu UU no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara tersirat memberikan makna bahwa peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui suatu proses perencanaan yang matang. Proses perencanaan tersebut harus melalui suatu analisis yang dapat menguraikan potensi-potensi daerah menjadi penunjang daya saing daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada kenyataannya, walaupun anpotwil telah menjadi hal yang harus dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan, namun masih banyak daerah yang belum mampu menggunakan anpotwil sebagai upaya menggali seluruh potensi yang dimiliki, baik dari segi sumber daya manusianya yang kurang kompetensinya serta masih banyak sektor sumber daya alam yang belum dimobilisir sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini tidak akan terjadi apabila pemerintahan daerah benar-benar memahami arti penting dan manfaat dari analisis potensi wilayah itu sendiri. Untuk itu pada paper ini membahas “ Analisis Kekuatan Potensi Lokal Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan mengambil study kasus di Kabupaten Simalungun. Permasalahan pada penelitian ini sejauh mana potensi digunakan dalam optimalisasi pembangunan di daerah. Penelitian ini mengangkat permasalahan analisis potensi lokal dilihat dari sisi etnis atau suku dalam pembangunan. Tulisan ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran untuk dapat memahami arti penting dan manfaat anpotwil sehingga dapat menjadi bekal dalam membangun daerah ke arah yang lebih baik. Pertanyaan awal yang muncul setelah bergulirnya dalam pelaksanaan pembangunan ; bagaimanakah sinergitas potensi lokal khususnya budaya lokal yang ada dalam perspektif pembangunan? apakah kekuatan budaya suku bangsa memiliki kekuatan dalam perspektif pembangunan ?

2. Tinjauan Pustaka.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. (UU Nomor 24 Tahun 1992: Penataan Ruang). Wilayah adalah bagian permukaan bumi yang membentuk suatu teritorial berdasarkan batas geografis tertentu (seperti suatu wilayah aliran sungai, wilayah kehutanan, wilayah dataran tinggi, wilayah pulau, wilayah Negara).

Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi, pengertian permukaan bumi menunjuk pada suatu tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Wilayah sering dibedakan artinya dengan kata daerah atau kawasan. Wilayah dapat diartikan sebagai satu kesatuan ruang yang mempunyai tempat tertentu tanpa terlalu memperhatikan soal batas dan kondisinya. Atau juga wilayah dapat diartikan, suatu areal yang memiliki karakteristik area bisa sangat kecil maupun sangat besar, suatu wilayah diklasifikasikan berdasarkan satu atau beberapa karakteristik, misalnya berdasarkan iklim, relief dipebatuan, pola pertanian, tumbuhan alami, kegiatan ekonomi dan sebagainya.

Purnomo Sidi (1981) mengatakan bahwa wilayah adalah sebutan untuk lingkungan permukaan bumi yang jelas batasannya. Imanuel Kaant (1982) mengatakan wilayah adalah sesuatu ruang di permukaan bumi yang mempunyai spesifik dan dalam aspek tertentu berbeda antara dua titik dalam garis lurus. Glasson (1974), Budi Harsono (1996), dan Huesmen (1986) mengatakan bahwa wilayah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu wilayah formal (formal region atau mogenous regoins) dan wilayah fungsional (Functional region atau nodul region).

- a. Wilayah formal adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek tertentu yang mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang relatif sama. Kriteria pokok yang digunakan antar wilayah dapat berbeda tergantung dasar atau tujuan pengelompokannya. Kriteria tersebut dapat berupa aspek fisik seperti ketinggian, bentuk lahan, dan curah hujan, kegiatan ekonomi (daerah pertanian), peternakan, industri dan sebagainya. Jadi pada wilayah seragam terdapat keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu.
- b. Wilayah fungsional adalah suatu wilayah yang mempunyai ketergantungan antara daerah pusat dengan daerah belakangnya atau suatu wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan dengan garis melingkar (daerah belakangnya). Oleh karena itu, pada wilayah gundul terdapat pengertian tentang kaitan fungsional antara pusat kegiatan. Wilayah seperti ini disebut wilayah fungsional. Contohnya wilayah kota dengan wilayah belakangnya. Lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan dan jalur transportasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah adalah Wilayah adalah bagian permukaan bumi yang membentuk suatu teritorial berdasarkan batas geografis tertentu (seperti suatu wilayah aliran sungai, wilayah kehutanan, wilayah dataran tinggi, wilayah pulau, wilayah Negara).

a. Pengertian Analisis Potensi Wilayah

Dalam sebuah wilayah mengkaji secara ilmiah rincian semua kekayaan atau sumber daya fisik maupun non fisik pada area atau wilayah tertentu sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kekuatan tertentu. Analisis Potensi Wilayah mencakup rona fisik dan rona sosial ekonomi. Rona Fisik wilayah mencakup lokasi wilayah baik relatif maupun absolute, luasan wilayah, bentuk lahan, kondisi topografi, kondisi lereng, kondisi tanah, kondisi iklim, kondisi hidrologi, kondisi geologi, penggunaan lahan, dan kondisi fisik lainnya.

Selain rona fisik wilayah, dalam anpotwil juga harus melakukan analisis tentang kondisi sosial ekonomi wilayah. Hal ini karena potensi wilayah secara utuh merupakan perpaduan antara rona fisik dan rona sosial ekonomi dari suatu wilayah. Data sosial ekonomi yang perlu dianalisis adalah:

- 1) Data penduduk (jumlah, kepadatan penduduk, rasio ketergantungan, tingkat pertumbuhan, mata pencaharian penduduk, dll.);
- 2) Data distribusi fasilitas umum/utilitas (seperti fasilitas pendidikan : jumlah dan persebaran sekolah, jumlah dan persebaran fasilitas kesehatan: Polides, Puskesmas, Rumah sakit; Pasar/pertokoan, terminal, dsb).
- 3) Data Aksesibilitas, seperti kondisi jaringan jalan atau kondisi transportasi, dan fasilitas yang lainnya.

Potensi berarti kemampuan yg mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan dan daya. Berpotensi artinya memiliki potensi. Menurut kamus bahasa Indonesia, potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang. Setiap orang memiliki potensi, dan tentu berbeda setiap apa yang dimiliki antara satu orang dengan orang lain.

Ada dua bentuk potensi yaitu potensi fisik dan potensi mental (psikis)

- Potensi fisik merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan apabila dilatih dengan baik. Kemampuan yang terlatih ini akan menjadi suatu kecakapan, keahlian, dan ketrampilan dalam bidang tertentu. Potensi fisik akan semakin berkembang bila secara intens dilatih dan dipelihara. Potensi fisik ini seperti, tubuh, otot, wajah, ketahanan ataupun kesehatan.
- Potensi psikis merupakan bentuk kekuatan diri secara kejiwaan yang dimiliki seseorang dan memungkinkan untuk ditingkatkan dan dikembangkan apabila dipelajari dan dilatih dengan baik. Potensi psikis ini meliputi IQ (*Intelligence Quotient*), EQ (*Emotional Quotient*), AQ (*Addversity quotient*) dan SQ (*Spiritual Quotient*).

Jadi potensi adalah kadar kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam implementasinya potensi tersebut dapat dianalisis yang diartikan sebagai kajian yang dilaksanakan terhadap suatu hal guna menelitinya secara mendalam. Misalnya pada kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

b. Budaya dalam Pembangunan

Dalam bangunan Indonesia Baru itu, model masyarakat majemuk yang didasarkan pada keragaman budaya sukubangsa seyogianya ditinggalkan untuk menuju masyarakat multikultural dengan kesederajatan dalam perbedaan, baik secara individual maupun kebudayaan. Tugas ilmuwan sosial tidak hanya menciptakan 'bangunan' baru itu, tetapi juga mengisi bangunan itu dengan struktur-struktur, pranata-pranata, dan organisasi-organisasi sosial, dengan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak, serta pembenahan hukum. Landasan pengetahuan diperlukan untuk memahami multikulturalisme, yakni bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia, antara lain: demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, ke sukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak azasi manusia, hak budaya komunitas, dan lain-lain.

Jika Suparlan menekankan peran ilmuwan antropologi/sosial pada upaya menciptakan masyarakat multikultural Indonesia, James J. Fox dari The Australian National University— dalam makalahnya berjudul: *Tracing Genealogies: Toward an International Multicultural Anthropology*—menekankan beberapa hal penting yang perlu dicermati para antropolog dalam pengembangan ilmu antropologi itu sendiri. Antropologi yang multikultural-internasional, itulah antropologi di masa kini dan masa depan. Untuk itu, penelusuran silsilah intelektual perlu dilaksanakan untuk mengetahui leluhur dalam suatu tradisi antropologi. Hal itu penting guna memahami betapa beragamnya, dan betapa luasnya pengaruh paradigma/perspektif intelektual yang melandasi terwujudnya suatu tradisi keilmuan, serta peralihannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua, metode etnografi dalam penelitian/studi antropologi amat penting untuk tetap dipertahankan, bahkan perlu diperkaya oleh perspektif komparatif. Ketiga, dalam menyongsong masa depan antropologi, dimensi 'lokal' yang menjadi perhatian utama antropolog kini memerlukan dimensi 'global', karena dunia mengalami perubahan yang berkelanjutan dengan perpindahan penduduk yang amat cepat.

Sebagai konsekuensinya, studi antropologi harus diformulasikan dalam suatu kerangka 'jaringan', karena berbagai hubungan sosial itu ternyata signifikan dalam pembentukan identitas komunitas-komunitas lokal. Terakhir, penggunaan teknologi mutakhir seperti video-recorder dalam penelitian antropologi dapat membuka berbagai kemungkinan baru bagi studi etnografi di masa

depan. Panel ini menggarisbawahi bahwa genre-genre folklor seperti tradisi lisan, mitologi, legenda, pepatah, dan makanan rakyat dapat memberi sumbangan pemikiran untuk memahami perbedaan etnis, ras, dan agama pada bangsa Indonesia yang merupakan masyarakat multikultural. Selain itu, folklor yang ada di tiap-tiap suku bangsa selain dapat menjadi identitas suku bangsa, juga dapat menumbuhkan sikap toleransi mengakui perbedaan yang ada, demokratis menumbuhkan sikap berani.

Semua itu tercermin dalam beberapa genre folklor yang disajikan dalam panel ini: legenda lanun dan pembuatan kue lanun merupakan simbol kekuatan dan keberanian orang Kangean. Cerita Taman Rukruknk tersosialisasi dalam sistem pengobatan orang Dayak Benuaq hingga hari ini, sementara cerita ken Dedes dan Ken Arok menggambarkan suatu konflik. Namun, tersirat di dalamnya paham Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya Tradisi lisan orang Nusa Tenggara Timur merupakan masukan berharga bagi pemerintah jika ingin program-program pembangunan berhasil di sana. Sementara itu, makanan dan pepatah Minangkabau mengandung pesan budaya Minangkabau yang sarat dengan nilai-nilai kearifannya. Orang Meratus berupaya untuk mencapai kesetaraannya dengan orang Banjar dengan cara mengidentikkan diri sebagai orang Banjar. Orang Sasak di Lombok yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya selalu menjaga lingkungan alamnya.

c..Modal Sosial (Social Capital)

Modal sosial merupakan kekuatan yang mampu membangun civil community yang dapat meningkatkan pembangunan partisipatif, dengan demikian basis modal sosial adalah trust, idiologi dan religi. Modal sosial dapat dicirikan dalam bentuk kerelaan individu untuk mengutamakan keputusan komunitas, Dampak dari kerelaan ini akan menumbuhkan interaksi kumulatif yang menghasilkan kinerja yang mengandung nilai sosial. Francis Fukuyama (1995) mengilustrasikan modal sosial dalam trust, believe and vertragen artinya bahwa pentingnya kepercayaan yang mengakar dalam faktor kultural seperti etika dan moral. Trust muncul maka komunitas membagikan sekumpulan nilai-nilai moral, sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Ia juga menyatakan bahwa asosiasi dan jaringan lokal sungguh mempunyai dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lokal serta memainkan peran penting dalam manajemen lingkungan. James S, Colement (1998) menegaskan bahwa, modal sosial sebagai alat untuk memahami aksi sosial secara teoritis yang mengkombinasikan perspektif sosiologi dan ekonomi. Pengertian ini dipertegas oleh Ismail Serageldin (1998) bahwa modal sosial selalu melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat muncul bukan semata dari interaksi pasar dan memiliki nilai ekonomis.

Ismail Serageldin memberikan klasifikasi modal sosial antara lain:

- Modal sosial dalam bentuk interaksi sosial yang tahan lama tetapi hubungan searah, seperti pengajaran dan perdagangan sedang interaksi sosial yang hubungannya resiprokal (timbal balik) seperti jaringan sosial dan asosiasi.
- Modal sosial dalam bentuk efek interaksi sosial lebih tahan lama dalam hubungan searah seperti kepercayaan, rasahormat dan imitasi sedang dalam bentuk hubungan timbal balik seperti gosip, reputasi, pooling, peranan sosial dan koordinasi, semua ini mengandung nilai ekonomi yang tinggi.

Berkaitan dengan menumbuhkan sikap demokratis, pada bagian lain Douglass North (1990) menyebutkan relasi modal sosial diformulasikan dalam berbagai struktur, misalnya pemerintah, rejim politik, aturan hukum dan sistem peradilan. </spanBerangkat dari jalannya pemerintahan, rejim politik, aturan hukum, dan sistem peradilan akan berdampak pada munculnya sikap-sikap demokratis dari bawah/masyarakat lokal.

d. Modal Sosial Sebagai Perekat Kehidupan Bermasyarakat.

Dalam pandangan ilmu ekonomi, modal adalah segala sesuatu yang dapat menguntungkan atau menghasilkan, modal itu sendiri dapat dibedakan atas (1) modal yang berbetuk material seperti uang, gedung atau barang; (2) modal budaya dalam bentuk kualitas pendidikan; kearifan budaya lokal; dan (3) modal sosial dalam bentuk kebersamaan, kewajiban sosial yang diinstitusionalisasikan dalam bentuk kehidupan bersama, peran, wewenang, tanggungjawab, sistem penghargaan dan keterikatan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif. Menurut James Colement (1990) modal sosial merupakan inheren dalam struktur relasi antarindividu. Struktur relasi membentuk jaringan sosial yang menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, kesatuan norma, dan menetapkan berbagai jenis sangsi bagi anggotanya.

Putnam (1995) mengartikan modal sosial sebagai “features of social organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit”. Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringkerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Hal ini sejalan pula dengan apa yang dikemukakan Bank Dunia (1999) modal sosial lebih diartikan kepada dimensi institusional, hubungan yang tercipta, norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial pun tidak diartikan hanya sejumlah institusi dan kelompok sosial yang mendukungnya, tapi juga perekat (social glue) yang menjaga kesatuan anggota kelompok sebagai suatu kesatuan.

Menurut Lesser (2000), modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media power sharing atau pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggungjawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama.

3. Metode Penelitian

Dalam kajian ini akan dilakukan dengan pendekatan etnometodologi, iaitu pendekatan yang berupaya mendeskripsikan dan memahami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bagaimana pola perubahan, cara berpikir, perasaan mereka, cara berbicara. Sementara untuk memperoleh hasil daripada sumber primer, dilakukan dengan jalan temu duga atau temubual kepada narasumber/responden secara mendalam (in depth interview). Meski cukup sukar untuk memperoleh data yang representatif dan akurat, namun metode penyertaan ikut serta (participant observation) juga tetap dilakukan. Sedikit banyak berdasarakan kepada data maupun pendapat daripada pihak-pihak yang di wawancara. Sebagai haluan daripada bahasan atau analisis di pandu oleh pemindaan interaksi sosial yang menimbulkan perubahan sosial dan membentuk modal sosial di wilayah Kabupaten Simalungun. Etnis suku yang dilihat adalah suku Jawa di kabupaten Simalungun.

a. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel tentu sahaja merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam melakukan kajian. Kerana teknik ini sangat menentukan dalam memperoleh data primer bagi kajian ini. Instrumen kajian ini disusun berdasarkan skala Likert.

Tuckman (1972) menyebutkan bahawa skala Likert merupakan model yang paling sesuai untuk menyatakan sikap dan pendapat seseorang mengenai obyek. Pada kajian ini skala Likert dinyatakan dalam kontinum dan masing-masing kontinum diberi skor. Rumusan penentuan saiz sampel iaitu :

$$no = \frac{t^2 \times p \times q}{d^2}$$

$$n = \frac{no}{no-1}$$

$$1 + \frac{N}{N}$$

Keterangan :

N adalah populasi kajian

P adalah populasi tiap strata

q = (1-p)

d = batas toleransi yang digunakan

Strata yang digunakan untuk menentukan besaran sampel terdiri daripada : 1) pekerjaan, 2) pendidikan, 3) Usia, 4) jenis kelamin, dan 5) Masa tinggal. Selanjutnya untuk memperoleh sampel minimal yang harus diselidiki sebagaimana telah dikemukakan diatas, dipergunakan rumus sebagai berikut :

$$n \geq \frac{pq (z_{1/2} \alpha)^2}{b}$$

Keterangan :

N = Bilangan sampel minimum

≥ = Sama dengan atau lebih besar

P = Proporsi populasi persentase kelompok pertama

Q = Proporsi sisa dalam populasi (1,00 – P)

Z_{1/2} = Derajat koefisien keyakinan pada 99% atau 95%

B = Peratusan perkiraan kemungkinan membuat kekeliruan dalam menentukan ukuran sampel.

Bilangan populasi suku Jawa di Simalungun adalah 398.203 orang. Di antara mereka itu yang tinggal di kawasan Kecamatan yang berpenduduk suku Jawa sebagai minoriti., jumlah penduduk Kabupaten Simalungun keseluruhan ialah sebanyak 855.783 orang. Besarnya sampel yang perlu diselidiki dalam rangka mengungkapkan adanya modal sosial yang positif dikalangan suku/suku Jawa di Simalungun ialah :

Perhitungan :

$$P = \frac{398.203}{855.783} \times 100\% = 46\% \text{ atau } p = 0,46$$

$$q = 1,00 - 0,46 = 0,54$$

$$Z_{1/2} = 1,96 \text{ (pada derajat keyakinan 95\% atau 0.05)}$$

$$b = 5\% \text{ atau } 0,05$$

Mengikut perhitungan itu, bilangan sampel pada kajian ini adalah :

$$n \geq \frac{0,46 \times 0,54 (1,96)^2}{0,05}$$

$$n \geq 194,74$$

Oleh kerana sampel adalah manusia, maka harus dibulatkan ke atas, yang berarti ukuran sampel sekurang-kurangnya atau minimum adalah 195 orang dan pada kajian ini ditetapkan jumlah sampel sebesar 500 orang. Mengenai rancangan pengambilan sampel pada petunjuknya ada dua iaitu; a) rancangan sampel probabiliti (probability sampling design) dan b) rancangan sampel non-probabiliti (non-probability sampling design). Untuk persampelan dalam kajian ini dilakukan untuk melihat respon penduduk terhadap perubahan sosial dan modal sosial terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Simalungun. Maka dalam hal penggunaan persampelan sesuai dengan keperluan kajian ditetapkan rancangan sampel non-probabiliti, kerana rancangan pengambilan sampel tidak menggunakan teknik random. Cara pengambilan sampel dengan cara sampel quota (sampling quota), dengan menentukan sampel pendapat umum (public opinion polls) dengan menentukan lebih dulu jumlah pada masing-masing daerah yang telah ditentukan yang disebut cara penetapan (Sanafiah Faisal, 2003).

Dengan melihat jumlah populasi suku Jawa di Kabupaten Simalungun maka dapat ditentukan jumlah sampel dari Kecamatan yang dipilih atas dasar blok sensus yang ada. Penentuan Kecamatan yang terpilih ialah dari jumlah suku Jawa di atas 30,000 orang penduduk suku Jawa yang ada di Kecamatan. Dari Kecamatan terpilih desa yang ditentukan sebanyak 25 desa yang penduduknya terbanyak suku Jawa dengan ketentuan 4 desa pertanian dan 1 desa bukan pertanian sebagai sampel. Desa pertanian yang dipilih sebagai sampel adalah kerana wilayah Kabupaten Simalungun merupakan daerah pertanian dan desa ini juga dibahagi dalam dua kelompok iaitu pertanian perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Dari sampel desa yang telah ditentukan secara terpilih akan dilakukan pemilihan responden atas dasar pekerjaan dan status penduduk yang ada sebanyak 500 orang secara sistematis (sistimatic random sampling) termasuk didalamnya 10 orang responden dari suku yang bukan Jawa yang digunakan sebagai bahan perbandingan pada kajian ini (sistimatic random sampling). Jumlah penduduk dari setiap Kecamatan terpilih pada kajian ini adalah ditunjukkan pada tabel.

b. Jenis, Teknik dan Cara Pengumpulan Data

Data tentang pola perubahan sosial serta pengaruh unsur primordial budaya dikumpulkan berasaskan kajian lapangan (field work); diklarifikasikan dan dideskripsikan secara holistik-integratif (thick descriptions), temu bual mendalam; dianalisis dan diinterpretasikan secara kualitatif oleh penyelidik dalam perspektif sistem pengetahuan dan sosiologi mahu pun antropologi sosial budaya untuk mengungkapkan native's point of view (native concept) dari masyarakat yang diteliti.

4. Temuan dan Pembahasan

Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Simalungun menunjukkan keragaman dari suku. Dilihat dari agihan suku, bangsa ternyata suku Jawa yang paling mayoritas jumlahnya diikuti oleh Tapanuli-Toba baru kemudian Simalungun. Sedangkan suku Aceh, Minang, dan keturunan Cina adalah minoriti. Daerah agihan penduduk jika dilihat dari jumlah pada jadual dapat dibagi pada dua kawasan iaitu: (a) kawasan bahagian atas yang mayoritas dihuni suku asli Simalungun, (b) kawasan bahagian bawah yang mayoritas dihuni suku Jawa. Maka terlihat bahawa masing-masing desa adalah masyarakat majemuk kerana ditandai oleh heterogenitas suku bangsa asal. Keanekaragaman suku bangsa ini akan melahirkan keanekaragaman budaya dan keanekaragaman pola kehidupan sebab suatu masyarakat apapun pasti mempunyai pola hidup sendiri dan kebudayaan sendiri. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Persentase Suku

No	Suku	Jumlah	Persentase
1	Melayu	3.692	0.43
2	Karo	11.283	1.32
3	Simalungun	135.396	15.82
4	Tapanuli/Toba	265.984	31.08
5	Mandailing	15.108	1.77
6	Pakpak	574	0.07
7	Nias	1.536	0.18
8	Jawa	398.203	46.53
9	Minang	387	0.05
10	Cina	549	0.06
11	Aceh	1.199	0.14
12	Lainnya	18.389	2.15
Jumlah		855.783	100

Sumber : Data Olahan.

Pemilikan modal sosial keturunan Jawa di Sumatera Utara, khas di kabupaten Simalungun boleh dicermati daripada berbagai-bagai sisi. Dalam kajian ini, pembentukan modal sosial itu dilihat daripada aspek kelompok (organisasi), interaksi sosial, konflik dan kekerasan, kepercayaan dan solidariti, aksi kolektif dan kerja sama, informasi dan komunikasi serta kerekatan sosial dan inklusi (pengucilan). Hasil kajian yang diperoleh daripada data primer melalui borang soal selidik yang diisi oleh responden, disajikan pada beberapa tabel berikut ini.

Kelompok adalah bagian penting dari sebuah masyarakat. Di dalam kelompok itulah individu saling berinteraksi satu sama lain. Aktivitas kelompok memungkinkan individu belajar tentang banyak hal. Oleh itu, sebuah masyarakat terdiri dari beberapa kelompok yang terikat dengan norma-norma tertentu dalam menjalankan berbagai aktivitas. Sebuah masyarakat diartikan sebagai sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan. Oleh itu, sebuah masyarakat yang menempati kawasan tertentu akan berinteraksi secara terus menerus sesuai dengan sistem dan adat istiadat tertentu mengikut aturan dalam komuniti itu.

Peran adat memang menjadi penting dalam sebuah kelompok dan selanjutnya dalam sebuah masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, adat istiadat yang diwariskan nenek moyang mereka masih dijunjung tinggi. Wujud warisan adat istiadat itu antara lain nilai-nilai hidup, norma, harapan, cita-cita, dan kebanggaan. Itu sebabnya banyak masyarakat yang tetap menjaga tradisi leluhur guna mewujudkan keharmonisan masyarakat, sehingga ahli kelompok yang melanggar tradisi berarti merusak keharmonisan masyarakat. Di dalam banyak komuniti, keinginan untuk menjaga tradisi leluhur dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan membentuk berbagai-bagai organisasi dengan fokus berbeda seperti aktivitas muzik, tari, drama, photography dan lukisan.

Di Indonesia keinginan untuk menjaga kelestarian budaya dan adat leluhur, lazim dilakukan oleh suku-suku tertentu. Salah satunya dilakukan oleh warga suku Jawa samada yang berada di Pulau Jawa mahupun yang berada di luar Pulau Jawa. Aktivitas ini dipandang penting kerana dengan aktivitas ini keharmonisan adat istiadat serta keinginan memelihara hubungan silaturahmi tetap terjaga. Selain itu, warga etnik Jawa diberi kebebasan untuk menjadi ahli kelompok yang berbeda. Oleh itu ada warga yang menjadi ahli kelompok pada dua atau lebih organisasi. Fenomena

itu menunjukkan penerapan suasana demokratis warga etnik Jawa melakukan berbagai aktivitas yang disukai mereka.

Untuk mendapatkan informasi akurat tentang aspek kelompok (kelompok), pada kajian ini diajukan beberapa pertanyaan kepada 500 responden kajian ini yaitu :

- Jenis atau banyaknya organisasi yang pernah diikuti dalam 5 tahun terakhir,
- Berapa kali menghadiri pertemuan dalam 12 bulan terakhir,
- Bagaimana cara responden dan ahli keluarganya sampai tergabung dalam kelompok tersebut
- Berapa banyak (uang atau barang) yang sudah disumbangkan secara ikhlas kepada organisasi tersebut selama 12 bulan terakhir
- Berapa hari yang telah dihabiskan beraktivitas untuk organisasi tersebut selama 12 bulan terakhir
- Apa keuntungan utama dari bergabung dengan organisasi tersebut
- Apakah dasar kesamaan untuk bergabung dalam organisasi
- Apakah ada perbedaan dari anggota organisasi bila dilihat tingkat pendapatan
- Dalam 5 tahun terakhir, bagaimanakah perkembangan jumlah ahli organisasi.
- Jika ada keputusan yang harus diambil dalam organisasi dari mana asalnya
- Bagaimana caranya ketua organisasi dipilih
- Secara keseluruhan, bagaimana efektiviti kepemimpinan organisasi
- Apakah organisasi tersebut bekerjasama atau berinteraksi dengan organisasi lain dengan tujuan yang sama yang ada di persekitaran sekitar
- Apakah organisasi bekerjasama atau berinteraksi dengan organisasi lain dengan tujuan yang sama yang ada di persekitaran luar.

Dalam pandangan responden, pertambahan jumlah organisasi yang diikuti oleh warga etnik Jawa dibandingkan 5 tahun lalu menunjukkan kenaikan signifikan. Sebanyak 139 responden (27.8%) menjawab sangat banyak jumlah organisasi yang boleh diikuti oleh etnik Jawa. Responden lain yaitu 263 orang (52.6%) menyebutkan banyak organisasi yang dapat dipilih. Sebanyak 80 responden (16%) menjawab sama banyaknya. Manakala 9 responden (1.8%) menjawab semakin berkurang dan sisanya 9 responden (1.8%) tidak menjawab. Data mengenai pertambahan jumlah organisasi yang diikuti dibandingkan 5 tahun lalu, disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.: Pertambahan Jumlah Organisasi Yang Diikuti Dibandingkan Dengan 5 Tahun Lalu

No	URAIAN	RESPONDEN	
		JUMLAH	Persentase
1	Sangat Banyak	139	27.8
2	Banyak	263	52.6
3	Sama banyak	80	16,0
4	Semakin berkurang	9	1,8
5	Tidak menjawab	9	1.8
Jumlah		500	100

Sumber : Kuestioner Penelitian

Untuk menghadiri pertemuan dalam aktivitas organisasi dalam 12 bulan terakhir, ahli keluarga yang ikut dalam aktivitas organisasi yang menghadiri pertemuan 2-4 kali adalah sebanyak 51.6 %. Jumlah ini hampir sama persentasenya jika dibandingkan dengan yang menghadiri pertemuan hanya 1 kali yaitu 127 responden (25.4%). Manakala yang mengikuti

pertemuan 3-5 kali sebanyak 17.6 % dan yang menghadiri dari lima kali sebanyak 18 responden (3.6%). Manakala sisanya, 9 responden (1.8%) tidak memberikan jawaban.

Tabel 3. : Kehadiran Anggota Organisasi Dalam Aktiviti Selama 12 Bulan Terakhir

No	Uraian	Responden	
		Jumlah	Persentase
1	Hanya 1 (satu) kali	258	51,6
2	2 – 4 Kali	127	25,4
3	3. 5 Kali	88	17,6
4	lebih dari 5 (lima) Kali	18	3,6
5	Tidak menjawab	9	1,8
Jumlah		500	100

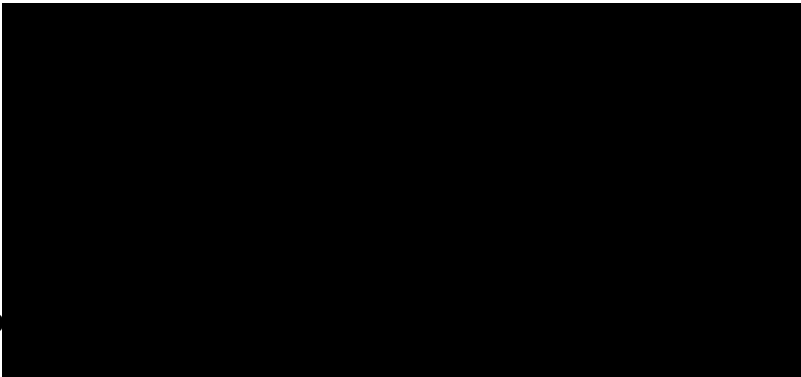
Sumber : Kuestioner Penelitian

Pertemuan organisasi lazimnya dilakukan secara berkala atau mengikut kepentingan yang diperlukan. Dalam rapat dibicarakan berbagai hal seperti perkembangan organisasi, aktivitas-aktivitas yang digalakkan untuk mendukung berbagai event skala lokal, nasional mahupun internasional dan berbagai-bagai masalah internal yang berlaku saat itu. Dalam konteks organisasi etnik Jawa, hal-hal yang hendak diputuskan dan disikapi, selalunya dilakukan secara mufakat, sehingga tidak ada hasil rapat yang diperoleh berdasarkan pemikiran satu atau dua orang saja. Suasana rapat juga dilakukan secara kekeluargaan, akrab dan memperhatikan buah pikiran anggota organisasi yang hadir dalam rapat itu. Oleh itu, tidak pernah ada konflik terhadap satu ataupun lebih keputusan yang telah disepakati. Para anggota keluarga yang menjadi anggota organisasi memiliki cara berbeda saat mereka hendak mulai sebagai anggota organisasi. Dalam kajian ini menunjukkan, ada anggota organisasi yang sengaja diundang sebagai anggota organisasi.

Jumlah anggota seperti ini adalah sebanyak 272 responden (54.4 %). Orang yang sengaja dijemput menjadi anggota organisasi lazimnya didasarkan kepada banyak pertimbangan seperti pemilikan kepakaran, merupakan tokoh adat, agama, budaya dan bidang lainnya yang dipandang perlu bagi melengkapi jumlah anggota organisasi. Berbagai-bagai orang dengan kepakaran berbeda ini memang sangat diperlukan agar berbagai masalah dan keahlian yang diperlukan dimiliki oleh organisasi.

Para anggota organisasi yang ikut dalam organisasi secara sukarela (ikhlas) adalah sebanyak 122 responden (24.4%). Manakala yang ikut dalam organisasi jika merasa diperlukan adalah sebanyak 84 responden (16.8%) dan yang ikut sejak lahir sebanyak 13 responden (2.6%). Jika dibandingkan antara yang diundang/dijemput untuk ikut (272 orang = 54,4%) dengan yang ikut jika merasa diperlukan (84 orang=16.8%), menunjukkan bahawa telah timbul peningkatan kesadaran masyarakat dan anggota keluarganya untuk ikut serta berperan dalam organisasi.

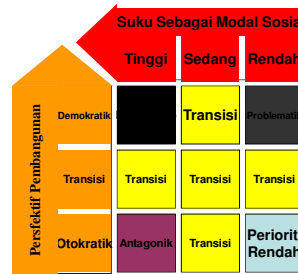
Suku Jawa yang ada di wilayah perkebunan sangat banyak jumlahnya dan bertempat tinggal di kawasan perkebunan, sehingga perilaku mayoritas sudah bergantung pada aturan yang di buat oleh pihak perkebunan. Hal ini merupakan salah satu modal dalam pembangunan yaitu budaya pekerja yang patuh, menguatnya solidariti organik dan individualistic. Interaksi dalam etnik sebagai salah satu bentuk modal sosial, orang Jawa lebih rendah dari orang Simalungun dan Batak. Orang Jawa tertinggal meningkatkan kualitas hidup dari orang Simalungun dan Batak secara kelompok. Hal ini dapat ditunjukkan pada persentase diagram berikut:

Gambar 1. D  **ng Suku Lain**

Dari hasil diatas diperoleh bahwa kekuatan potensi budaya lokal sangat memiliki potensi dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dalam perspektif pembangunan hal ini sangat mendukung dalam keberlanjutannya. Karena adat adalah dasar tata hidup yang diwariskan oleh generasi-generasi secara berturut-turut dan pada umumnya bersifat kuat dan konservatif. Perubahan-perubahan sosial budaya boleh juga terjadi, akan tetapi biasanya hanya jarang-jarang, sedangkan prosesnya lambat, dan lingkup sosialnya terbatas. Modernisasi adalah sebaliknya dari adat. Dengan modernisasi terjadi perubahan-perubahan dengan susul-menyusul, prosesnya cepat, bahkan makin lama makin cepat, sedang lingkupnya mengenai ramai bidang kehidupan masyarakat secara bersamaan waktu. Dalam ulasannya Selo Sumardjan (1993), pada waktu sekarang tampak terjadi perubahan-perubahan dalam bentuk masyarakat Indonesia yang hasilnya akan berperan fungsional dalam penyelenggaraan industri.

Beberapa perubahan yang fundamental untuk menentukan kualiti masyarakat disebutkan di bawah ini : Masyarakat adat dan masyarakat petani yang pada umumnya berbentuk utuh dan manunggal (homogeneous) mengalami diversifikasi profesi. Kalau semula semua orang di dalam masyarakat adat dan pertanian berprofesi petani, maka dalam proses modernisasi timbul berbagai profesi seperti pedagang, pengrajin, guru, tukang becak, pegawai negeri, anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, doktor, penguam, penyanyi dan sebagainya. Jumlah pranata (social institutions) yang semula hanya sedikit sahaja, satu demi satu bertambah dengan pranata-pranata baru, misalnya Bank, Travel Bureau, Bioskop, Hotel, Supermarket, berbagai macam sekolah, berbagai lembaga swadaya masyarakat (Lembaga Sosial Masyarakat atau NGO), Organisasi politik, Bursa efek dan sebagainya. Lower class (golongan rendah) mengecil dan berkurang menjadi beban masyarakat. Middle class (golongan menengah) yang menjadi motor dalam pembangunan nasional bertambah besar dan bertambah kuat. Upper class (golongan atasan) juga bertambah besar, sedang mereka sampai sekarang tetap aktif dalam pembangunan seperti middle class. Upper class dan middle class inilah yang secara de-facto merupakan pelopor dalam pembangunan dan kemajuan.

Temuan Kajian Tentang Hubungan Potensi Budaya Lokal dengan Persektif Pembangunan



Gambar 2. Hubungan Budaya Lokal Terhadap Perspektif Pembangunan

Pembauran antar suku budaya di tingkat upper class dan middle class, terutama di dalam masyarakat bandar, telah boleh menurunkan batas-batas pemisahan puak, akan tetapi kerana kurang komunikasi, pembauran antar puak di kawasan pedesaan belum boleh berjalan dengan lancar. Pemerintah telah boleh berjalan dengan efektif di bidang kerajaan dan pembangunan. Sayang sekali kewibawaan Kerajaan ramai diragukan kerana ramai tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh peribadi-peribadi pejabatnya. Kehidupan keluarga (bapak, ibu dan kanak-kanak) tetap kuat dan berpengaruh dalam sosialisasi anak-anak. Kecuali perubahan-perubahan sosial yang berpengaruh pada bentuk masyarakat ada lagi perubahan-perubahan di bidang kebudayaan yang besar pengaruhnya pada proses-proses perkembangan masyarakat. Sebagai kesan dari proses modenisasi terjadi transformasi nilai-nilai dan kaidah-kaidah kebudayaan didalam masyarakat Indonesia.

Perubahan-perubahan budaya itu yang penting terjadi dibidang politik dan ekonomi, lagipula di bidang hubungan antar warga masyarakat umum. Kalau diamati lebih cermat maka perubahan-perubahan budaya yang dibawa oleh proses modenisasi itu pada hakekatnya terjadi dalam transformasi sosial dari golongan petani menjadi golongan industri. Perkembangan kebudayaan di atas kecuali membawa akibat-akibat positif, juga menjadi sebab timbulnya gejala-gejala budaya yang negatif. Modenisasi yang diiringi dengan perubahan-perubahan budaya yang cepat secara susul-menyusul mengakibatkan suatu suasana anomie yang berkepanjangan. Suasana anomie adalah suasana ketika masyarakat yang sedang mengalami perubahan budaya itu tidak mengetahui secara jelas nilai-nilai mana yang harus dianut, yang lama yang sedang surut atau yang baru yang sedang tumbuh ?. Suku Jawa di Simalungun. Nilai mana yang dianut ?.

Menurut Selo Sumardjan (1993), untuk menghilangkan frustasi sosial itu diperlukan suatu langkah konsolidasi budaya, misalnya dalam bentuk produk hukum baru yang menegaskan pilihan nilai yang perlu dianut.

Konsolidasi budaya juga boleh dilakukan di luar hukum, misalnya dengan ucapan seorang pemimpin politik atau agama yang berpengaruh besar dalam masyarakat. Dalam hal ini peranan media komunikasi massa tidak boleh dianggap kecil. Kelemahan budaya di dalam hal ini, adalah kerana adanya kecendrungan, bahawa tanggapan hukum atau ucapan para panutan masyarakat datangnya lambat atau mungkin malah tidak datang sama sekali. Kelemahan budaya ini boleh menimbulkan disorganisasi budaya dan merosotnya kesadaran hukum masyarakat.

5.Kesimpulan

Perubahan-perubahan kontemporer yang mengacu pada UU. No.22/1999 dan UU No 32 tahun 2004 mengandung banyak kelemahan, karena tidak secara otomatis berarti adanya sharing

politik dan ekonomi antara pusat dan daerah. Yang diberikan pada desa adalah sistem administrasi (yang terdiferensiasi), bukan otoritas/kekuasaan. Sehingga dalam perspektif pembangunan di daerah jika tidak dapat di control akan dapat menimbulkan konflik-konflik dalam praktik hukum memperlihatkan bahwa apa yang menjadi budaya masyarakat dalam berbagai bentuknya belum diakui dan bahkan diingkari dalam pelaksanaan hukum. Konflik hukum adat dengan hukum nasional telah menyebabkan manipulasi sistem dan praktik hukum di Indonesia. Hal ini memperlihatkan tidak terjadinya sintesis antara budaya lokal dengan budaya global. Karena desentralisasi harus dilihat sebagai perluasan bagi bidang/ruang ekspresi kebudayaan, sehingga kebudayaan dapat menjadi faktor dalam penataan sosial yang terjadi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh agen yang lain. Ruang yang terbuka ini hanya dapat muncul jika terdapat kemauan politik yang tampak dari komitmen pemerintah dalam kebijakan-kebijakan. Proses desentralisasi tidak dapat didefinisikan sebagai pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah, tetapi harus didefinisikan sebagai perubahan sistem dan praktik politik yang lebih partisipatif yang tampak dari kemampuan akomodasinya terhadap kebudayaan daerah.

Pemahaman tentang kebudayaan daerah masih sangat terbatas dalam beberapa arti. Pertama, studi tentang kebudayaan Indonesia yang lebih up to date dan komprehensif tidak tersedia dengan cukup. Kedua, pengetahuan tentang kebudayaan secara komparatif yang mencakup berbagai daerah di Indonesia belum tersedia. Ketiga, definisi tentang 'lokal' atau 'daerah' dalam kebudayaan lokal dan kebudayaan daerah belum jelas.

Sehingga dalam perspektif pembangunan daerah kekuatan potensi local sangat perlu diperhatikan dalam rangka keberlanjutan pembangunan, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan dari desa saat ini, dimana desa sangat berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya anggaran satu milyar per desa, maka kekuatan potensi local, salah satunya budaya atau suku yang ada dalam sebuah wilayah sangat perlu diperhatikan.

Daftar Pustaka

- "Multikultur Kota Denpasar: Penampilan Fisik Minus Cerminan Budaya", dalam Bali Post, 21 Februari 2004.
- Ã,Ã Christopher J Webster, Analytical Public Choice Planning Theory, Submitted to TPR September 23rd 1997.
- Ã,Ã Smith, B.C. 1985. Decentralization: The Territorial Dimension of the State, George Allen & Unwin, London.
- Ã,Ã Sudjatmoko, Pembangunan Ekonomi Sebagai Masalah Budaya, dalam Muhidin M. Dahlan (Editor), Sudjatmoko:Kebudayaan Sosialis, Kumpulan Tulisan Diterbitkan Dalam Rangka Mengenang 12 Tahun Wafatnya Raksasa Intelektual Indonesia, Penerbit Melibas, Edisi Pertama, Jakarta, Oktober 2001.
- Ã,Ã Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Jakarta.
- Ã,Ã Ã,Ã Conyers, Diana and Peter Hills. 1990. An Introduction to Development Planning in the Third World, John Wiley & Sons, New York.
- Agung, Ida Cokorda Ngurah. "Lintasan Babad Badung". Tulisan yang belum diterbitkan. Denpasar, 1983. Koleksi Puri Satria, Denpasar.
- E.R. Alexander, Why Planning Vs. Markets Is An Oxymoron: Asking The Right Question, Planning & Markets, University of Southern California, Los Angeles, <http://www-pam.usc.edu>. 2000

- Irma Adelman, The Role of Government in Economic Development, Working paper No. 890, Department of Agriculture and Resource Economics and Policy, University of California at Berkeley, California Agriculture Experiment Station, May 1999.
- Mikkelsen. Britha, 2001. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Alih Bahasa Nalle, Matheos. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Moeljarto, T. 1987. Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Mubarak, Zaki, 2010. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan, Tesis. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Muttaqin. Merancang Pembentukan Motivator Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipatif, Jakarta: Badiklit Depsos RI
- Nas, P. J. M., Kota di Dunia Ketiga. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1979.
- Nazir M. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia; Bogor.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rondinelli, Dennis A. dan G. Shabbir Cheema. 1983. Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries, Sage Publications, London.
- Sjoberg, Gideon. The Preindustrial City: Past and Present. Totonto: The Free Press, 1960.
- Warsilah, Henny. Golongan Menengah Bali Di Simpang Budaya. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI, 1997.
- Wirawan, Anak Agung Bagus. "Tanah dan Perubahan Sosial di Bali 1882-1942". Tesis S2 belum diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 1985.

Catatan : Karya Ilmiah ini Telah Dipublikasi Pada Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa, ISBN : 978-602-99467-03, Penerbit Universitas Andalas, 2016.